

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan mengapa riset ini penting untuk dibangun dan dikaji. Riset ini dibangun atau diawali dari isu pentingnya *Knowledge Management*(KM) untuk efektivitas, efisiensi dan nilai tambah di organisasi atau perusahaan serta permasalahan KM yang timbul, dimana KM masih dibangun dalam perpektif teknologi (*software*) didalam perusahaan atau organisasi bisnis. Di sisi lain akses pengetahuan dan pengelolaan inovasi sangat diperlukan juga di dalam organisasi dunia pertanian khususnya pada komunitas petani kecil di kawasan pertanian. Rendahnya SDM pertanian di kawasan pertanian membutuhkan solusi agar terus berkembang dalam menghadapi persaingan serta membangun potensi manfaat dalam peningkatan informasi dan transfer pengetahuan.

1.1. Latar Belakang

Knowledge Management (KM) sangat penting dalam memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian masalah guna peningkatan daya saing, nilai tambah dan inovasi dalam organisasi. KM saat ini masih berada dalam tataran atau perspektif teknologi dimana KM merupakan sebuah konsep dimana informasi diubah menjadi pengetahuan dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan bagi yang membutuhkan (*software*). Selain itu KM saat ini masih didominasi oleh organisasi bisnis untuk efektivitas dan efisiensi dari operasional sistem organisasi.

Konteks dari KM merupakan kegiatan organisasi dan anggotanya dalam mengelola pengetahuan sebagai aset, sehingga terdapatnya interaksi dan berbagi pengetahuan. Selain itu pentingnya KM dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian masalah demi peningkatan inovasi dan keunggulan kompetitif dalam organisasi. Hal ini diungkapkan secara jelas oleh Okunoye, 2002; Fattahian, 2012; Chin-stang, 2009; Carneiro, 2000; Gloet dan Samson 2013; Schiuma dan Lerro, 2008 ; Bai, 2014; Folorunso 2007; Davis, 2005; (Menaouer et al, 2015).

Masalah – masalah yang berhubungan dengan KM memiliki dampak yang serius terhadap keberlanjutan suatu organisasi. Berikut masalah-masalah yang berhubungan dengan KM yang tersaji pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Masalah-masalah KM di Organisasi

Pemahaman terhadap konsep KM	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi tidak menjelaskan secara jelas mengenai informasi organisasi kepada anggota, seperti visi dan misi.
Faktor teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dokumentasi untuk kegiatan yang dilakukan. • Penyimpanan dokumen yang tidak tersentralisasi; • Metode transfer pengetahuan yang kurang efisien
Faktor budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakmauan untuk berbagi sehingga terjadi penimbunan pengetahuan • Ketidakdisiplinan untuk menulis apa yang didapat

Sumber : Mtega, 2015, Gloet dan Samson 2013, Wince&Handra, 2011

Faktor yang terkait dalam pelaksanaan KM di organisasi meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, teknologi informasi (Suharti, 2009; Badamas, 2009; Saini dan Ritika, 2013) dan pengaruh keterlibatan pimpinan (Kanaan, 2013; Lopez, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa KM bukanlah merupakan tujuan akhir sebuah organisasi, melainkan merupakan metode agar perusahaan atau organisasi selalu mempunyai energi untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam waktu yang cepat sehingga organisasi dapat mempertahankan daya hidupnya melalui penyebaran inovasi dan kompetensi (Nowacki, 2015).

Dari perspektif teknologi, manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep dimana informasi diubah menjadi pengetahuan dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan bagi orang yang membutuhkan. Namun dalam riset ini KM yang dibangun merupakan sistem yang dibuat untuk menciptakan, mendokumentasikan, menggolongkan dan menyebarkan *knowledge* dalam organisasi sehingga *knowledge* mudah digunakan kapanpun diperlukan, oleh siapa saja dalam hal ini komunitas petani kecil, penyuluh, pedagang, industri kecil dan *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam sinergi pembangunan diseminasi inovasi

teknologi di kawasan pertanian, seperti yang dijelaskan oleh (Wang, 2016; Menaouer, 2015 ; Hartwich, 2007).

Pendekatan KM di kawasan pertanian telah dilakukan di beberapa negara di Asia dan Afrika seperti Bolivia, Ghana, Tanzania dan India. Salah satu bentuk kegiatan peningkatan pengetahuan di Tanzania yaitu melalui penggunaan jaringan (*networking*) atau kolaborasi diantara penyedia teknologi (lembaga penelitian, petani, lembaga keuangan, pemerintah, dan agen lainnya) dalam program inovasi pertanian. Selanjutnya di Ghana melalui aplikasi KM dalam praktek penyuluhan pertanian yang menjelaskan pentingnya keterlibatan, interaksi berkelanjutan antara peneliti dengan petani dalam mengakses pengetahuan, serta integrasi manajemen pengetahuan asli (*indigeneous knowledge*) dengan pengetahuan luar, sekaligus peran kemitraan publik-swasta yang kuat di pedesaan dalam meningkatkan akses terhadap pengetahuan dibidang pertanian (Boeteng, 2006 ; Hartwich, 2007; Iwoga, 2011 ; Mtega, 2016).

Selanjutnya Islam, (2010) juga mengungkapkan bahwa untuk menangani masalah produksi dan teknologi pertanian maka dilakukan *Agricultural Knowledge Management System (AKMS)*, yang terdiri dari organisasi, sumber pengetahuan, metode komunikasi, dan perilaku yang terlibat dalam proses pertanian, sehingga untuk mengatasi hambatan produksi di kawasan adalah dengan melakukan pendekatan partisipatif yang disebut *Knowledge Brokering* (menghubungkan petani pedesaan dengan peneliti nasional dan internasional) yang bertujuan untuk pembangunan sistem pada komunitas petani dalam mengelola masalah usaha tani.

Berkaitan hasil riset dan temuan dari beberapa negara diatas, bahwa permasalahan utama yang sama juga ditemui di Indonesia adalah penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar petani yang rendah, dan kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani kecil semakin mendorong terpuruknya petani ke dalam kemiskinan (Agustian, 2003; Syahyuti, 2003; Dollahite, 2005 ; Siswiyanti, 2006 ;; Kevany, 2007 ; Lozano, 2008; Bationo, 2012; Iqbal, 2012 ; Purwanto, 2007; Nasrul, 2012 ; Malyan, 2014) dan ini harus ditunjang dengan kerjasama yang erat antar *stakeholders* seperti petani, peneliti, pemerintah dan pelaku penyuluhan pertanian (Sulaiman, 2002; Hoffmann, 2009; Wahab, 2012).

Salah satu alternatif solusi guna mengatasi permasalahan ekonomi petani dalam hal peningkatan pendapatan petani kecil yaitu dengan membangun komunitas dan pembangunan kawasan dengan mendirikan unit-unit usaha bisnis yang produktif dan komoditas melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bersama-sama. Sinergi keberlanjutan pembangunan pertanian yang berbasis komunitas khususnya komunitas lokal semakin mengemuka akibat terjadinya berbagai kegagalan pemerintah (*government failure*) (Suradisastra, 2011; Syahyuti, 2005).

Berbicara tentang pembangunan kawasan pertanian, sudah banyak kawasan pertanian yang telah dibangun di Indonesia antara lain Kawasan Khusus yaitu Kawasan Khusus Peternakan (KUNAK), Kawasan Industri Peternakan (KINAK), Kawasan Sentra Produksi (KSP), Sentra pembangunan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU), Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), dan Agropolitan. Berikut perkembangan program pembangunan kawasan di Indonesia yang tersaji pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perkembangan program pembangunan kawasan di Indonesia

Model Kawasan Khusus seperti KUNAK, KINAK	Model Kawasan Integrasi	Model Kawasan Terpadu (agropolitan)
<ul style="list-style-type: none"> • Definisi : Kawasan yang memiliki kegiatan utama usaha dengan komoditas unggulan. • Kendala : Kurangnya koordinasi antar lembaga, penurunan tarif impor, penghentian kredit , alih fungsi lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi : Kawasan pembangunan komoditas unggulan yang terintegrasi antara komoditas unggulan satu dengan komoditas lainnya. • Kendala : Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh masih lemah, Kerjasama antar sektoral kurang berkembang dengan baik, alih fungsi lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi : Pendekatan yang dibangun dengan pendekatan yang berfokus pendekatan kerjasama antar sektor atau multisektoral • Kendala : Tingkat pemilikan lahan yang sempit, dukungan SDM pertanian belum optimal, lembaga penyuluhan dan alih teknologi belum efektif, tingkat penerapan teknologi belum optimal.

Sumber : Kementan, 2014, Faizah & Santoso, 2013 ; Herawan, 2013; Farhanah&Prajanti, 2015

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa kawasan – kawasan pertanian yang dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas petani kecil. Selain itu dengan adanya pembangunan kawasan dapat menggabungkan kelompok-kelompok tani kecil yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengefisieni biaya produksi petani dengan kualitas dan produktivitas yang optimal, sekaligus terhubung dengan sistem logistik dan pemasarannya.

Selanjutnya pembangunan suatu kawasan tentunya memiliki tingkat pertumbuhan, efisiensi dan daya saing yang lebih tinggi jika dibandingkan yang berada diluar kawasan atau terpencar-pencar, seperti yang diungkapkan oleh (Iqbal dan Anugrah, 2009; Setiyanto, 2013; Kementan, 2015). Namun pembangunan kawasan yang dibangun selama ini lebih terfokus kepada peningkatan hasil (*output oriented*), dan belum menyentuh atau berorientasi pada aspek peningkatan pengetahuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petani sehingga berimplikasi kepada tingkat penerapan teknologi dan inovasi yang belum optimal.

Hal lainnya juga diketahui bahwa pembangunan kawasan pertanian ini mengalami kendala dan kegagalan program yang diakibatkan oleh pola proyek. Kendala program yang dialami juga disebabkan pembangunan kawasan pertanian yang lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi pertanian, kurang terfokus pada pengelolaan jangka panjang juga kurangnya sinergi antar lembaga (*stakeholders*) dalam membangun kawasan, infrastruktur pertanian, modal, teknologi pertanian, pemasaran, dan minat serta SDM yang rendah (Setiyanto, 2013; Kementan, 2015).

Rendahnya SDM di kawasan pertanian membutuhkan solusi berupa akses pengetahuan dan pengelolaan inovasi serta kemampuan diri untuk terus bertahan dalam arus globalisasi agar terus berkembang dalam menghadapi persaingan serta membangun potensi manfaat dalam peningkatan informasi dan transfer pengetahuan dalam komunitas pertanian (Badamas, 2009). Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukanlah suatu pendekatan yang terintegrasi antara pengetahuan dan inovasi, dalam pembangunan kawasan pertanian yang dikenal dengan manajemen pengetahuan (*Knowledge Management*).

KM yang dibangun dalam riset ini merupakan sistem yang dibuat untuk menciptakan, mendokumentasikan, menggolongkan dan menyebarkan *knowledge* dalam organisasi sehingga *knowledge* mudah digunakan kapanpun diperlukan, oleh siapa saja sesuai dengan tingkat otoritas dan kompetensinya termasuk petani kecil, penyuluh, pedagang, industri kecil dan *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam sinergi pembangunan diseminasi inovasi teknologi di kawasan pertanian. (Wang, 2016; Menaouer, 2015). Sinergi ini merupakan hal atau isu yang penting dalam pembangunan pertanian di seluruh dunia saat ini yaitu keberlanjutan atau *sustainability* (Riva'i, 2011; Chen, 2012).

Salah satunya melalui keberlanjutan pembangunan pertanian dengan melakukan sinergi antar faktor sosial, ekonomi dan ekologi, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bersama-sama (*Common Property Resources/CPRs*) melalui hak kepemilikan dari semua individu (akses terbuka), privat, negara dan komunitas dan keberlanjutan pembangunan pertanian yang berbasis komunitas khususnya komunitas lokal yang semakin mengemuka akibat terjadinya berbagai kegagalan pemerintah (*government failure*) (Suradisastra, 2011; Syahyuti, 2005). Fakta lain juga menunjukkan bahwa program-program pembangunan pertanian belum mampu dan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KM yang berkaitan dengan proses inovasi komunitas petani kecil di kawasan pertanian diharapkan mampu meningkatkan peran, fungsi dan sinergi pada kelembagaan guna peningkatan usaha dan kehidupan petani kecil di kawasan. Kelembagaan petani merupakan lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), yang berupa organisasi keanggotaan atau kerjasama. Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian organisasi petani, juga aturan main (*role of the game*) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga.

1.2 Masalah Penelitian

Pembangunan kawasan pertanian bertujuan mendorong terciptanya efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah produksi usaha tani guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Namun pembangunan kawasan pertanian yang terjadi selama ini di Indonesia belum menunjukkan keberhasilan. Hal ini disebabkan pembangunan kawasan pertanian yang dikembangkan masih beorientasi pada peningkatan produksi (*output oriented*), dan belum menyentuh pada aspek SDM dan pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management/KM*) petani kecil dan kelembagaannya.

Pendekatan KM dalam pembangunan kawasan pertanian menjadi penting jika dijalankan secara kolektif dalam suatu komunitas. Kolektifitas dalam komunitas pertanian bercirikan hubungan keterikatan dan kebersamaan antar petani kecil dalam mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama harus diwujudkan dalam tindakan kolektif guna mewujudkan perubahan atau transformasi pertanian. Transformasi pertanian tidak hanya berupa mekanisasi dan teknologi namun juga menyangkut pada pengelolaan pengetahuan guna meningkatkan pendapatan petani. Selain itu bentuk transformasi yang terjadi adalah transformasi kelembagaan, yang menjadikan posisi petani kecil beralih sebagai subjek pembangunan dan sumber dari penyusunan kebijakan pembangunan pertanian, sehingga proses KM komunitas petani kecil ini mampu memberikan perubahan paradigma, dari petani sebagai konsumen pengetahuan menjadi petani produsen pengetahuan pada pembangunan kawasan pertanian.

Tindakan kolektif ini dibentuk untuk mengikat setiap individu dalam kelompok agar terus berkomitmen dalam mencapai tujuan bersama dan juga keuntungan (Marshall, 2009). Selain itu Gregorio *et.al.* 2009 juga menyatakan bahwa masyarakat secara alamiah cenderung memilih melakukan tindakan kolektif dengan individu lain ketika merasa ada kesamaan tujuan dan resiko yang dihadapi. Hal ini berakibat pada proses pertukaran dipasar, tindakan kolektif ini membuat pihak-pihak yang bertransaksi menjadi lebih mudah dan lancar (Meinzen-Dick *et al.*, 2004; Syahyuti, 2008).

Pentingnya tindakan kolektif juga dijelaskan oleh Kruijssen *et al.*, 2007, yang menyatakan bahwa tindakan kolektif petani kecil mampu menyatukan

sumber daya dan memasarkan produk secara berkelompok, meningkatkan daya tawar, memfasilitasi sertifikasi dan pembuatan label sehingga dapat mengatasi masalah biaya transaksi yang timbul akibat kecilnya skala pertanian.

Pendekatan KM di kawasan pertanian juga telah menjadi perhatian khusus di berbagai negara di Asia dan Afrika, diantaranya dalam program inovasi pertanian di Tanzania melalui penggunaan jaringan atau kolaborasi diantara penyedia teknologi, dan di Ghana dalam praktek penyuluhan pertanian dengan melakukan integrasi antara peneliti dan petani, peran kemitraan publik-swasta dan integrasi pengetahuan asli dengan pengetahuan luar. Selanjutnya pada kawasan pertanian di India untuk menangani masalah produksi dan teknologi pertanian, dengan melakukan pendekatan kolaboratif dan partisipatif melalui *Agricultural Knowledge Management System* (AKMS). Berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dibangun dari riset *knowledge management* komunitas petani kecil di kawasan pertanian adalah proses penciptaan, penyimpanan, penyebaran dan pengaplikasian pengetahuan yang juga didukung oleh kolaborasi, sinergi antar *stakeholders*, jaringan dan infrastruktur teknologi dalam mengakses pengetahuan petani kecil dan kelembagaannya guna peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah usaha tani.

Pendekatan dan kajian KM petani kecil dalam komunitas sangat perlu dikembangkan pada kawasan pertanian di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian cukup besar terutama Kabupaten Solok yang menjadi kawasan prospektif yang menaungi Kecamatan Lembah Gumanti (Dinas Pertanian Pemkab Solok, 2016; Kementan, 2015).

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menambahkan kajian KM komunitas petani kecil pada pembangunan kawasan pertanian sebagai fungsi atau bagian dari KM *process* diantaranya adalah akuisisi, penyimpanan, distribusi dan aplikasi pengetahuan, sehingga kondisi ini menarik dan menjadi suatu pemikiran untuk ditelusuri, yaitu berkaitan dengan “mengapa KM komunitas petani kecil belum mampu memberikan peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah inovasi di kawasan pertanian?”.

Berbagai pertanyaan spesifik yang diidentifikasi dan dicari jawabannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek atau implementasi *Knowledge Management (KM)* yang terjadi di kawasan pertanian?
- b. Apa saja faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan KM di kawasan?
- c. Bagaimana model pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) komunitas petani kecil di kawasan pertanian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

- a. Menganalisis praktek atau implementasi KM komunitas petani kecil di kawasan pertanian.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan KM di kawasan pertanian.
- c. Merumuskan model KM komunitas petani kecil di kawasan pertanian.

1.4 Proposisi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang disandarkan pada tinjauan teori, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka didapatkan proposisi penelitian sebagai berikut:

Diduga belum adanya sinergi antara petani dan *stakeholders* dalam membangun KM di kawasan pertanian. Proposisi penelitian diatas dapat dimaknai sebagaiberikut: **KM pada komunitas petani kecil akan terwujud di kawasan pertanian jika didukung oleh sinergi antar petani dan *stakeholders*.**

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Kontribusi dari sisi akademis atau pengembangan ilmu

Manfaat penelitian ini dari sisi akademis atau pengembangan ilmu adalah diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan tentang kajian KM komunitas petani kecil pada kawasan pertanian, dimana KM sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah guna peningkatan daya saing, nilai tambah dan inovasi dalam komunitas petani kecil. KM saat ini masih berada dalam tataran atauperspektif teknologi dimana manajemen pengetahuan merupakan sebuah konsep dimana informasi diubah menjadi pengetahuan dan tersedia dalam bentuk yang

dapat digunakan bagi yang membutuhkan (*software*). Selain itu manajemen pengetahuan saat ini masih didominasi oleh organisasi bisnis untuk efektivitas dan efisiensi dari operasional sistem organisasi.

Hal lainnya adalah bahwa KM yang dibangun ini berada di kawasan pertanian. Ini membuktikan bahwa kawasan pertanian bertujuan untuk meningkatkan SDM petani dengan menggabungkan kelompok-kelompok tani kecil yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi petani dengan kualitas dan produktivitas yang optimal, sekaligus terhubung dengan sistem logistik dan pemasarannya.

b. Kontribusi dari sisi praktis atau kebijakan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan terhadap petani kecil terkait penyediaan informasi dan inovasi teknologi yang efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian serta sebagai bahan masukan bagi instansi yang berkompeten dalam bidang inovasi dan diseminasi hasil penelitian untuk menyediakan informasi teknologi pertanian yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Selain itu analisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sebagai produk hukum dapat berkontribusi terhadap arah kebijakan yang lebih memfokuskan pada KM komunitas petani kecil di kawasan pertanian

1.6 Novelty (Kebaruan) Penelitian

Berdasarkan dari hasil proposisi penelitian, yang dikembangkan melalui hasil penelitian terdahulu maka diidentifikasi *research gap*, diperoleh novelty atau kebaruan dari penelitian ini yaitu :

1. Konsep penerapan KM komunitas petani kecil di kawasan pertanian, berdasarkan literatur belum banyak ditemuan kajiannya.
2. Kerangka kerja (*framework*) KM di komunitas, belum banyak ditemuan literturnya.
3. Penentuan level maturitas KM untuk komunitas pertanian belum ada di dalam literatur.